

RISALAH KEBIJAKAN

Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di NTB Melalui Pembangunan Berketahanan Iklim

Graciella Stevani Gulo, Farhan Habibie, dan Muhammad Aldi*

 Oktober 2025

Ringkasan Eksekutif

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut diperburuk oleh dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menetapkan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. Di NTB pemenuhan layanan dasar pendidikan menghadapi tiga persoalan utama: 1) kerusakan fasilitas sekolah di wilayah pesisir akibat potensi kenaikan muka air laut; 2) meningkatnya risiko anak putus sekolah di daerah terdampak; dan 3) kerentanan ganda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Untuk itu, risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain integrasi risiko iklim ke dalam kebijakan layanan dasar pendidikan, pemetaan prioritas pembangunan sekolah tahan bencana, dan peningkatan penyediaan layanan pendidikan inklusif di daerah rentan kenaikan muka air laut.

Kata kunci: layanan dasar, pendidikan, kenaikan muka air laut, pembangunan berketahanan iklim

Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Suparman, 2023). PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM menegaskan pendidikan termasuk kategori layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Di Provinsi NTB, peningkatan akses pendidikan telah menjadi salah satu arah kebijakan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Pencapaiannya diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta persentase capaian literasi dan numerasi.

Pada 2024, RLS NTB mencapai 7,87 tahun, meningkat dari 7,74 tahun pada 2023. HLS 2024 juga naik tipis menjadi 13,98 tahun dari 13,97 tahun pada 2023. Meskipun ada kemajuan, RLS NTB masih berada di bawah rata-rata nasional 9,22 tahun yang menandakan masih adanya kesenjangan akses pendidikan antarwilayah (BPS, 2025).

* Analisis Kebijakan di SKALA dan United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP AP).

Penyediaan layanan dasar pendidikan di Provinsi NTB masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak. Tantangan ini berpotensi semakin besar akibat dampak perubahan iklim, salah satunya kenaikan muka air laut. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) mencatat bahwa

periode 1901–2018, rata-rata tinggi permukaan laut global meningkat sekitar 0,20 meter.

Di Indonesia, kenaikannya mencapai 8–12 mm per tahun (Bappenas, 2021). Kondisi ini mengancam wilayah pesisir NTB dengan banjir rob yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan.

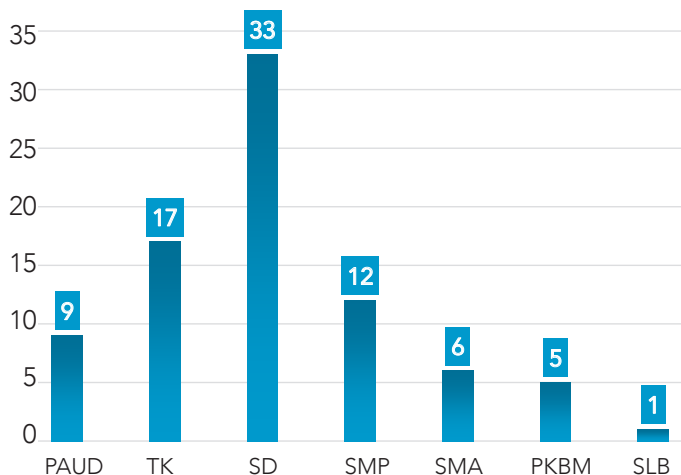
Deskripsi Masalah

Berikut ini beberapa tantangan penyediaan layanan dasar pendidikan di Provinsi NTB dalam menghadapi potensi kenaikan muka air laut setinggi satu meter akibat perubahan iklim. Proyeksi dampak ini disusun berdasarkan penggabungan data kenaikan muka air laut dari United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP AP), data Regsosek, dan data Dapodik.¹

Kerusakan fasilitas sekolah. Berdasarkan RPJPD NTB 2025–2045, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan pada 2045 mencapai 11.536 unit, terdiri dari 5.400 unit PAUD, 3.527 unit SD, 1.449 unit SMP, 560 unit SMA, 525 unit SMK, dan 75 unit SLB. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pertimbangan dampak perubahan iklim dalam perencanaan dan pemetaan pembangunan fasilitas pendidikan.

Namun, proyeksi kenaikan muka air laut setinggi satu meter berpotensi merusak sebagian fasilitas sekolah sehingga menghambat proses belajar mengajar. Gambar 1 merupakan hasil analisa data Dapodik 2024 yang menunjukkan jumlah sekolah terdampak berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi NTB.

Gambar 1. Jumlah Fasilitas Sekolah Terdampak Kenaikan Satu Meter Muka Air Laut



Sumber: Dapodik, 2024

Berdasarkan data grafik tersebut, jenjang yang paling terdampak adalah TK dan SD. Kerusakan fasilitas di dua jenjang ini berisiko menghambat pencapaian literasi dan numerasi dasar, yang merupakan pondasi kualitas pendidikan di NTB.

Meningkatnya risiko anak putus sekolah. Kenaikan muka air laut juga berpotensi memperlambat upaya penurunan angka putus sekolah. Diperkirakan terdapat 12.890 anak usia sekolah yang berisiko terdampak langsung dengan 11.884 anak di antaranya masih aktif bersekolah. Dari jumlah tersebut, 51% (6.111 anak) merupakan siswa SD dan 26% merupakan siswa SMP. Sebaran terbesar terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, dengan rincian di Sumbawa sebanyak 1.587 siswa SD dan 749 siswa SMP, serta di Bima sebanyak 1.440 siswa SD dan 803 siswa SMP. Tingginya jumlah ini menunjukkan besarnya risiko anak putus sekolah sebelum melanjutkan ke jenjang SMA di wilayah terdampak.

Kerentanan ganda bagi anak disabilitas. Dari 12.890 anak usia sekolah yang berpotensi terdampak, terdapat 59 anak penyandang disabilitas sedang dan berat. Pada kelompok penyandang disabilitas sedang, 34 anak terdampak, mayoritas 25 anak masih bersekolah. Pada kelompok disabilitas berat, terdapat 22 anak terdampak, mayoritas 13 anak belum pernah sekolah. Anak-anak dengan disabilitas sedang yang masih bersekolah menjadi kelompok yang paling terdampak sehingga berisiko mengalami gangguan akses pendidikan akibat dampak perubahan iklim.

Sesuai dengan RPJPD Provinsi NTB 2025–2045, pendidikan untuk penyandang disabilitas merupakan bagian dari sistem pendidikan daerah. Karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif dan tangguh.

¹ Hasil analisis dampak kenaikan muka air laut terhadap layanan dasar di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh Program SKALA dan United Nations Global Pulse.

Kebijakan yang Disasar

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, merata, dan tangguh terhadap risiko perubahan iklim, kebijakan pembangunan di NTB perlu memperkuat sinergi antara agenda pendidikan dan adaptasi iklim. Beberapa kebijakan utama yang relevan dan perlu penyempurnaan antara lain:

- Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi NTB 2025–2045. Saat ini, pendekatannya masih berfokus pada infrastruktur dan teknologi, belum mencakup jenis layanan dasar pendidikan.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah NTB 2025–2045, belum mengintegrasikan aspek perubahan iklim pada arah pembangunan sektor pendidikan.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 105 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2023–2027 belum secara eksplisit mengintegrasikan risiko dan adaptasi perubahan iklim dalam indikator kinerja dan program pelayanan dasar.
- Peraturan Gubernur NTB Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sudah mencakup aspek kesiapsiagaan pra, saat, dan pascabencana, tetapi belum menekankan dimensi perubahan iklim secara komprehensif.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pengintegrasian risiko iklim ke dalam kebijakan layanan dasar pendidikan

Pemerintah Provinsi NTB perlu merevisi atau menambahkan klausul adaptasi perubahan iklim dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 105 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 63 Tahun 2020. Selain itu, aspek layanan dasar pendidikan perlu dimasukkan ke dalam Rencana Aksi PRKBI guna memperkuat sinergi antara pemenuhan SPM dan kebijakan adaptasi perubahan iklim.

2. Pemetaan prioritas pembangunan sekolah tahan bencana

Sejalan dengan arah pembangunan RPJPD Provinsi NTB 2025–2029, pemetaan ini penting untuk memastikan pembangunan sekolah dilakukan di lokasi aman dari potensi kenaikan muka air laut. Sekolah-sekolah baru harus dirancang dengan standar infrastruktur yang tahan bencana dan dapat berfungsi jangka panjang sebagai tempat belajar yang aman bagi semua anak.

3. Peningkatan penyediaan layanan pendidikan inklusif di daerah rentan kenaikan muka air laut

Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan perbaikan aksesibilitas fisik seperti pembangunan atau perbaikan jalan menuju sekolah, serta penguatan program bantuan pendidikan bagi anak keluarga terdampak, khususnya anak disabilitas. Dengan demikian, anak-anak di wilayah rawan bencana tetap memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

